

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bergulirnya roda reformasi sejak 1998 menuntut terjadinya perubahan di segala bidang, tidak terkecuali masalah birokrasi. Jika birokrasi tidak melakukan perubahan maka ia akan memasuki tahap kemelut yang akan merugikan masa depan sistem politik Indonesia. Mengawali agenda reformasi, beberapa undang-undang yang dianggap tidak relevan lagi isinya diganti dengan undang-undang yang baru. Di bidang pemerintahan, ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan tata penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari adanya otonomi daerah tentu akan membawa berbagai konsekuensi yang cukup signifikan bagi para birokrat sebagai pelaksana penyelenggara negara. Hal ini merupakan jawaban atas tuntutan reformasi politik dan demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat daerah. Setelah selama hampir seperempat abad kebijaksanaan otonomi daerah di Indonesia mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang dibelenggu oleh sistem sentralisasi.

Otonomi daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah atau desentralisasi membuat manajemen daerah bisa berkembang lebih baik, partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi karena dekat dengan kekuasaan dan dengan adanya kontrol dan pengawasan bisa membatasi ruang gerak apa yang disebut dengan korupsi dan antek-anteknya.

Tia Nurlatifah, 2014

PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerintahan desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana pasal 1 ayat 9 tahun 2013 Undang-Undang tentang Desa menyebutkan bahwa kawasan pedesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Hal ini bertujuan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan masyarakatnya sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Tetapi tujuan pembangunan tersebut tidak akan terwujud ketika tidak ada kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat untuk membangun desanya dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan desa akan menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintahan desa, dimana terdapat permasalahan yaitu bahwa desa Mekarhurip merupakan desa pemekaran (desa baru), pembangunan desa yang masih minim, dan partisipasi masyarakat yang minim.

Pertama, desa Mekarhurip merupakan desa pemekaran (desa baru) dari desa induk Desa Sudalarang yang mulai dimekarkan pada tahun 2003. Alasan dilakukan pemekaran sebagaimana diungkapkan oleh Pak Use selaku tokoh masyarakat yang ikut memperjuangkan pemekaran tersebut adalah “jika masih bersatu dengan Desa Sudalarang ternyata yang termasuk paling barat yang tidak kebagian masalah pembangunan”, beliau merasa miris melihat keadaan masyarakat dan berkeinginan untuk memajukan daerah melalui pemekaran tersebut.

Melihat keadaan tersebut maka dilakukan suatu pemekaran wilayah pedesaan oleh aparat pemerintah berserta masyarakat. Hal ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan

pembangunan serta bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur dan mewujudkan kemandirian daerah. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal Akan lebih tersedia serta meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran wilayah desa yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang ekonomi, keuangan (rencana add 1 Milyard setiap desa), pelayanan publik dan aparatur pemerintah desa termasuk juga mencakup aspek sosial politik, batas wilayah maupun keamanan serta menjadi pilar utama pembangunan pada jangka panjang.

Bagi suatu desa yang baru dimekarkan, memiliki tanggung jawab bagi pemerintahan baru dan daerah otonom baru Desa Mekarhurip dalam menjalankan roda ke pemerintahannya dengan mandiri dan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur serta bisa mempercepat akselerasi pembangunan daerah yang menyeluruh.

Kedua, dalam pembangunan terdapat permasalahan yaitu terlihat dengan tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, prasarana fisik, dan kelembagaan yang rendah. Masalah dalam pendapatan dikarenakan masyarakat memiliki akses yang lemah terhadap faktor-faktor produktif, modal usaha, keterampilan, dan informasi yang rendah. Masalah di bidang pendidikan adalah sarana prasarana yang kurang memadai, dan kualitas tenaga pengajar. Di bidang kesehatan, masih kurangnya sarana prasarana kesehatan, tenaga medis, sistem pelayanan, dan rendahnya tingkat kesadaran akan pola hidup yang sehat.

Berkenaan dengan sarana fisik yaitu jalan antar desa yang masih memerlukan pembenahan untuk kelancaran akses. Masalah ini timbul karena dalam proses pembuatan jalan tidak ada yang mengawasi dari pemerintah desa dan masyarakat, sehingga kualitas jalan rendah dan mudah rusak. Selain itu sarana yang lain

adalah rendahnya kepemilikan sarana sanitasi keluarga seperti jamban, tidak adanya sistem pengelolaan sampah atau tempat pembuangan, mengindikasikan bahwa minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan pola hidup yang bersih.

Ketiga, partisipasi masyarakat yang masih minim terlihat dari kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi. Partisipasi menurut Rono dan Abdillahi (2003) merupakan aktif dan terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan permasalahan dalam pembangunan pedesaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Mekarhurip. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa masih belum maksimal, dan dalam pelaksanaan pembangunan belum memenuhi semua kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat mengenai prioritas kebutuhan masyarakat yang utama dalam pembangunan. Hal ini menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat enggan untuk terlibat atau berperan serta dalam pembangunan, karena mereka kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga mereka tidak mengetahui tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, dalam Ketentuan Umum Pada Undang-undang No 78 Tahun 2007 poin (6) menyatakan bahwa:

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa prakarsa masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan sehingga peran serta desa sebagai lembaga pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat mempunyai peran krusial dalam pembangunan nasional menuju kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan peran sentral tersebut maka desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa diberikan kewenangan

Tia Nurlatifah, 2014

PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam mengelola keuangan dan secara mandiri menjalankan roda pemerintahannya sendiri melalui prinsip-prinsip pemerintahan partisipatif.

Melihat Desa Mekarhurip sebagai desa baru, akan lebih sulit di awal untuk melaksanakan pemerintahannya karena harus dengan mandiri melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pembangunan dengan otonomi yang dimilikinya. Disini peran pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD) sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Kepemimpinan pemerintahan desa sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa. Pemerintahan desa memiliki informasi dan komunikasi mengenai hal-hal yang berkaitan kepentingan masyarakat. Pemimpin dalam hal ini merupakan suatu sosok atau figur yang mengetahui segala hal mengenai masyarakat dan menjadi panutan bagi masyarakat karena memiliki kekuasaan, kewibawaan, dan kepandaian yang menjadi perhatian masyarakat. Melalui sosok seorang pemimpin tersebut suatu pembangunan bisa diselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien.

Masyarakat juga sangat berperan dalam mewujudkan pembangunan desa. Melalui masyarakat pemimpin mengetahui berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembangunan guna untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu pembangunan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan masyarakatnya akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan harus dilakukan pembangunan yang partisipatif, dimana masyarakat berperan aktif dan atau ikut serta dalam proses pembangunan.

Sejalan dengan penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muhammad Fadli (2010) menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses yang membutuhkan kepemimpinan dan partisipasi. Kepemimpinan dan partisipasi sulit dipisahkan. Kepemimpinan yang bagus tetapi dilandasi dengan partisipasi yang jelek tidak akan membawa proses pembangunan mencapai hasil secara maksimal. Demikian juga sebaliknya, partisipasi yang bagus tetapi kepemimpinan tidak mendukung juga membuat tujuan pembangunan sulit dicapai sesuai harapan.

Dari penelitian tersebut jelas bahwa peran pemimpin dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemimpin serta partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pembangunan. Maka dari itu perlu kerjasama antara pemerintahan desa sebagai pemimpin pemerintahan dan masyarakat dalam melakukan program pembangunan, serta bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa memimpin anggotanya dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya usaha pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Karena dengan itu pemerintahan desa bisa mengetahui kebutuhan masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, begitupun sebaliknya masyarakat bisa berpartisipasi mengelurkan aspirasi dan tenaganya dalam pembangunan tersebut. Untuk itu interaksi dan hubungan antara pemerintahan desa dengan masyarakat harus dipelihara.

Melihat berbagai kenyataan dalam pelaksanaan kepemimpinan masyarakat, menarik untuk diteliti dimana perlu adanya suatu kajian atau penelitian mengenai pelaksanaan kepemimpinan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mencari solusi dengan memberikan pengetahuan tentang perlunya kepemimpinan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam satu studi penelitian dan mengambil judul: “PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA”.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas tergambar bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai peran kepemimpinan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan uraian lebih rinci sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan desa dalam melaksanakan program pembangunan desa, menyangkut kepemimpinan yang diterapkan oleh

pemerintahan desa dengan mengidentifikasi kepemimpinan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa melalui teori kepemimpinan transformasional.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan kesadaran akan pentingnya program pembangunan desa untuk kesejahteraan bersama dalam memenuhi kebutuhan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diidentifikasi melalui bentuk partisipasi yang diberikan; tahapan partisipasi yang dilakukan masyarakat mencakup keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta evaluasi program pembangunan desa; dan tingkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintahan desa mencakup faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa.
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintahan desa mencakup solusi dari pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang dan identifikasi mengenai masalah pokok penelitian yaitu dengan rumusan masalah penelitian “Peran Kepemimpinan Pemerintahan Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Agar rumusan masalah tersebut menjadi rinci, maka dikembangkan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?
3. Hambatan apa yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintahan desa?

4. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintahan desa?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintahan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mekarhurip Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut.

2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana kepemimpinan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa.
- b. Mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- c. Mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintahan desa.
- d. Mengetahui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan desa dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintahan desa.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan tersebut di atas, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau wawasan keilmuan yang dikhususkan dalam bidang kajian ilmu sosiologi khususnya sosiologi organisasi, sosiologi pembangunan, dan sosiologi desa kota yang dikhususkan dalam peranan kepemimpinan pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Tia Nurlatifah, 2014

PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Peneliti

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang ilmu sosiologi.
- 2) Untuk menambah wawasan luas mengenai kondisi riil di masyarakat terutama mengenai pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

b. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu membuka mata masyarakat bahwa partisipasi mereka dalam pembangunan desa sangat penting guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Pemerintahan Desa

- 1) Membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperbaiki kinerja pemerintahan desa dalam peranannya sebagai pemimpin masyarakat.
- 2) Mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang ada.

d. Prodi Pendidikan Sosiologi

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu mengenai kepemimpinan sebagai contoh mengenai penerapan kepemimpinan dalam pemerintahan terutama untuk kajian mata kuliah sosiologi organisasi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan dalam meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah sosiologi pembangunan dan sosiologi pedesaan yang berhubungan dengan pembangunan desa dan partisipasi masyarakat desa.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan contoh dalam menerapkan dan menghubungkan beberapa cabang ilmu sosiologi dalam mendeskripsikan suatu fenomena dan penerapannya di lapangan.

Tia Nurlatifah, 2014

PERAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

F. Struktur Organisasi Skripsi

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka skripsi ini disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I skripsi berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. Berikut ini disajikan uraian tiap bagian dari bab I pendahuluan.

1. Latar belakang: bagian ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut dileliti, pentingnya masalah ini diteliti, dan pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut, baik dari sisi teoritis maupun praktis.
2. Identifikasi masalah penelitian: pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan mengidentifikasi masalah, penulis pun dapat menentukan batasan permasalahan.
3. Rumusan masalah penelitian: rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah ini dibuat setelah diidentifikasinya masalah penelitian.
4. Tujuan penelitian: menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh karena itu rumusan tujuan harus selaras dengan rumusan masalah dan harus mencerminkan proses penelitiannya.
5. Manfaat penelitian: manfaat penelitian bisa dilihat dari salah satu atau beberapa aspek, yaitu dari segi teori, mengatakan apa yang belum atau kurang diteliti dalam kajian pustaka yang merupakan kontribusi penelitian. Sedangkan dari segi kebijakan, membahas perkembangan kebijakan formal dalam bidang yang dikaji dan memaparkan data yang menunjukkan betapa seringnya masalah yang dikaji muncul dan betapa kritisnya masalah atau dampak yang ditimbulkannya.

6. Struktur organisasi skripsi: bagian ini berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam skripsi, mulai bab pertama hingga bab terakhir.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Tinjauan pustaka: tinjauan pustaka mempunyai peran yang sangat penting. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan serta hipotesis penelitian. Dalam kajian pustaka, peneliti membandingkan, mengontraskan dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti.
3. Kerangka pemikiran: merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis dengan mengkaji hubungan teoritis antar variabel penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, termasuk beberapa komponen lainnya, yaitu :

1. Lokasi dan subjek populasi/ sampel penelitian: merupakan cara pemilihan sampel, serta justifikasi dari pemilihan lokasi serta penggunaan sampel.
2. Desain penelitian: merupakan pemilihan desain penelitian.
3. Metode penelitian: penggunaan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian.
4. Definisi operasional: yang dirumuskan untuk setiap variabel harus melahirkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti yang kemudian akan dijabarkan dalam instrument penelitian.
5. Instrumen penelitian: cara melakukan atau menggunakan instrumen.
6. Proses pengembangan instrumen: terdiri dari pengujian validitas, reliabilitas.
7. Teknik pengumpulan data: teknik yang dipilih dalam penelitian, yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi, studi literatur.

8. Tahap Penelitian: berisi tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum penelitian yaitu tahap pra-penelitian dan tahap pelaksanaan penelitian.
9. Analisis data: berupa laporan secara rinci tahap-tahap analisis data, serta teknik yang dipakai dalam analisis data itu. Untuk data Kualitatif yaitu dengan melakukan reduksi data, display data/penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal utama yaitu, analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian serta pembahasan dari penelitian.

BAB V: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab V berisi mengenai simpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian terhadap hasil analisis temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lainnya yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum dalam uraian harus dicantumkan dalam daftar pustaka.